

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 39/PMK.03/2016
 TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN
 JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA
 PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN
 DENGAN PERPAJAKAN

Daftar Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain,
 Rincian Jenis Data dan Informasi, Bentuk Data, Cara, dan Jadwal Penyampaian

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPbn), Kementerian Keuangan	I. Data MPN, paling sedikit memuat: 1. Nama KPPN 2. Tanggal pembukuan 3. Nama bank/ pos 4. NTB (Nomor Transaksi Bank) 5. NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) 6. Akun penerimaan 7. Nilai setor rupiah 8. Nomor urut transaksi 9. <i>Reversal flag</i> kegiatan anggaran 10. <i>Flag</i> hasil rekon atas 11. <i>Flag</i> hasil rekon bawah 12. <i>Id</i> database 13. <i>Id</i> baris 14. Nomor Pokok Wajib Pajak 15. Kode KPP (Kantor Pelayanan Pajak)	Data transaksi MPN (Modul Penerimaan Negara) yang telah di rekon oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
		II. Data SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), paling sedikit memuat: 1. Tahun anggaran 2. Nama Satker 3. Nomor SPM 4. Kode akun 5. Nomor SP2D 6. Tanggal SP2D 7. Tanggal SPM 8. Nilai pengeluaran 9. Tahun pengeluaran 10. Bulan pengeluaran	Data SP2D KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)	Elektronik	<i>Online</i>	1 Mei 2013	Harian (disampaikan hari berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		III. Data Potongan SP2D KPPN, paling sedikit memuat: 1. Tahun anggaran 2. Nama Satker 3. Nomor SPM 4. Kode akun 5. Nomor SP2D 6. Tanggal SP2D 7. Tanggal SPM 8. Bagian anggaran 9. Eselon I 10. Provinsi 11. Daerah Tingkat II 12. Nilai penerimaan 13. Nomor Pokok Wajib Pajak 14. Tahun Pajak 15. Jenis setoran 16. Nomor rekening transaksi 17. Nomor urut 18. NTPN		Elektronik	Online	1 Mei 2013	Harian (disampaikan hari berikutnya)
		IV. Data Pengeluaran SP2D KPPN, paling sedikit memuat: 1. Tahun anggaran 2. Nama Satker 3. Nomor SPM 4. Kode akun 5. Nomor SP2D 6. Tanggal SP2D 7. Tanggal SPM 8. Nilai pengeluaran 9. Bulan pengeluaran 10. Tahun pengeluaran		Elektronik	Online	1 Mei 2013	Harian (disampaikan hari berikutnya)
		V. Data Pegawai Negeri Sipil Pusat, paling sedikit memuat: 1. Nama Satker 2. Kode Satker 3. Nama anak Satker 4. Kode anak Satker 5. NIP pegawai		Elektronik	Online	31 Maret 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. NPWP pegawai 7. Nama pegawai 8. Alamat pegawai 9. Tanggal lahir 10. Jenis kelamin 11. Kedudukan 12. Gaji pokok 13. Status kawin 14. Status pegawai 15. Golongan 16. Masa kerja tahun 17. Jabatan 18. Tunjangan terpencil 19. Tunjangan Papua 20. Kode hakim 21. Pendidikan 22. Terhitung Mulai Tanggal (TMT) golongan 23. Terhitung Mulai Tanggal (TMT) kenaikan gaji berkala 24. <i>Grade</i> remunerasi 25. Terhitung Mulai Tanggal (TMT) CPNS	Contoh: Tugas Belajar/Aktif/MPP PNS atau CPNS Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak				
28	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	I. Profil Akuntan Publik (AP), paling sedikit memuat: 1. Nama 2. Alamat tempat tinggal 3. Tempat dan tanggal lahir 4. NPWP 5. Nomor Registrasi AP 6. Nomor dan tanggal izin AP 7. Nomor dan masa berlaku keanggotaan asosiasi profesi 8. Status AP	Informasi umum mengenai identitas Akuntan Publik Nomor identitas yang diberikan PPAJP kepada Akuntan Publik Nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Akuntan Publik Nomor dan jangka waktu keanggotaan pada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Meliputi antara lain: a. Penghentian pemberian jasa asuransi untuk sementara waktu (cuti); b. Mengundurkan diri; c. Meninggal;	Elektronik	Online	1 September 2013	Semesteran (paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		9. Nomor dan tanggal Surat Persetujuan/ Keputusan serta jangka waktu Persetujuan/ Keputusan	d. Dikenakan sanksi (Pembekuan izin / pembatasan pemberian jasa tertentu/pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu/pencabutan izin); e. Aktif; f. Tidak berlakunya izin				
		II. Profil Kantor Akuntan Publik (KAP), paling sedikit memuat: 1. Nama KAP 2. Bentuk usaha 3. Nomor registrasi AP pemimpin KAP 4. Nomor dan tanggal izin KAP 5. NPWP KAP 6. Alamat KAP 7. Nomor dan tanggal izin cabang KAP 8. Nomor registrasi AP pemimpin cabang 9. NPWP cabang KAP 10. Alamat cabang KAP 11. Status KAP 12. Nomor dan tanggal Surat Keputusan serta jangka waktu Keputusan	Termasuk Daftar Cabang Perseorangan/persekutuan/firma Nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik Meliputi antara lain: a. Penutupan; b. Aktif; c. Dikenakan sanksi (Pembekuan izin/ pembatasan pemberian jasa tertentu/pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu/pencabutan izin) d. Tidak berlakunya izin	Elektronik	Online	1 September 2013	Semesteran (paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)
		III. Daftar dan Riwayat Rekan KAP (AP dan non AP), paling sedikit memuat: 1. Nama rekan AP	Berisi data tempat bekerja AP dan non AP pada suatu KAP	Elektronik	Online	1 September 2013	Triwulan (paling lambat akhir bulan Maret,

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Nomor registrasi AP 3. Nama rekan non AP 4. NPWP rekan non AP 5. Surat tanda terdaftar rekan non AP 6. Nama KAP 7. Terhitung mulai					Juni, September, Desember)
		IV. Daftar Klien KAP, paling sedikit memuat: 1. Nama klien KAP 2. Alamat klien KAP 3. NPWP 4. Tahun buku 5. Penandatanganan Laporan Auditor Independen (LAI) 6. Opini 7. Go Public/Non Go Public 8. Bidang usaha klien 9. Jumlah laba/rugi bersih klien 10. Jumlah aset klien	Data mengenai entitas yang merupakan klien KAP untuk pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan Nomor register AP yang menandatangani LAI	Elektronik	Online	1 September 2013	Tahunan (paling lambat akhir bulan Desember)
		V. Daftar Auditor KAP, paling sedikit memuat: 1. Nama auditor KAP 2. Jenis kelamin (L/ P) 3. Nama jabatan pada KAP 4. Terhitung mulai tanggal menempati jabatan pada KAP 5. Posisi dalam pelaksanaan Audit Umum 6. Jam kerja Audit Umum 7. Mulai bekerja 8. Pendidikan terakhir	Daftar pegawai yang bekerja sebagai auditor di KAP	Elektronik	Online	1 September 2013	Tahunan (paling lambat akhir bulan Desember)
		VI. Daftar Tenaga Kerja Asing KAP, paling sedikit memuat: 1. Nama KAP 2. NPWP KAP 3. Nama tenaga asing 4. Pendidikan terakhir 5. Keahlian profesional 6. Kewarganegaraan 7. Mulai bekerja 8. Nomor dan tanggal Surat Izin Kerja	Daftar pegawai KAP yang berkewarganegaraan asing	Elektronik	Online	1 September 2013	Tahunan (paling lambat akhir bulan Desember)

No	Nama Instansi	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk	Cara	Penyampaian	Jadwal
----	---------------	----------------------------------	-----------	--------	------	-------------	--------

	Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain			Data	Penyampaian	Pertama Kali	Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		VII. Laporan Keuangan KAP, paling sedikit memuat : 1. Nama KAP 2. NPWP KAP 3. Tahun buku 4. Neraca Komparatif 5. Laporan Laba Rugi Komparatif 6. Laporan Arus Kas		Elektronik	Online	1 September 2013	Tahunan (paling lambat akhir bulan Desember)
		VIII. Profil Penilai Publik, paling sedikit memuat: 1. Nama 2. Alamat tempat tinggal 3. Tempat dan tanggal lahir 4. NPWP 5. Nomor Izin Penilai Publik (NIPP) 6. Nomor dan tanggal Keputusan 7. Nomor dan masa berlaku keanggotaan Asosiasi Profesi 8. Status Penilai Publik 9. Nomor dan tanggal Surat Persetujuan/ Keputusan serta jangka waktu Persetujuan/ Keputusan	Informasi umum mengenai identitas Penilai Publik Nomor klasifikasi izin Penilai Publik Nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Penilai Publik Nomor dan jangka waktu berlakunya keanggotaan pada Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Meliputi antara lain: a. Penghentian pemberian jasa Penilai Publik untuk sementara waktu atas permintaan sendiri (cuti); b. Mengundurkan diri; c. Meninggal; d. Dikenakan sanksi (Pembekuan izin/ pencabutan izin) e. Aktif	Elektronik	Online	1 September 2013	Semesteran (paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)
		IX. Profil Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), paling sedikit memuat: 1. Nama KJPP 2. Bentuk usaha KJPP 3. Nomor izin Penilai Publik bagi pemimpin/ pemimpin rekan KJPP 4. Nomor dan tanggal izin KJPP	Profil termasuk Daftar Cabang, Daftar Perwakilan, dan Daftar Rekan Perseorangan/persekutuan/firma Nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Usaha KJPP	Elektronik	Online	1 September 2013	Semesteran (paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)
No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga,	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian

	Asosiasi, dan Pihak Lain						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. NPWP KJPP 6. Alamat KJPP 7. Nomor dan tanggal izin pembukaan cabang KJPP 8. Nomor izin Penilai Publik pemimpin cabang KJPP 9. NPWP cabang KJPP 10. Alamat cabang KJPP 11. Daftar rekan PP 12. Daftar nama rekan non PP 13. Status KJPP 14. Nomor dan tanggal surat keputusan serta jangka waktu Keputusan 15. Nomor dan tanggal surat persetujuan pembukaan kantor perwakilan KJPP 16. Penanggung jawab kantor perwakilan KJPP 17. Alamat kantor perwakilan KJPP	Nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Pembukaan Cabang KJPP Meliputi: a. Nama; b. Nomor Izin Meliputi antara lain: a. Penutupan; b. Aktif; c. Dikenakan sanksi (pembekuan izin/ pencabutan izin); d. Tidak berlakunya izin Nomor dan tanggal Surat Keputusan Kepala PPAJP tentang Persetujuan Pembukaan Kantor Perwakilan KJPP Nama penanggung jawab kantor perwakilan KJPP				
		X. Daftar Klien KJPP, paling sedikit memuat: 1. Nama pemberi tugas/pengguna jasa KJPP 2. Alamat pemberi tugas/pengguna jasa KJPP 3. Tahun pelaporan 4. Status <i>Go Public</i> /Non <i>Go Public</i> 5. Kepemilikan 6. Jenis jasa yang diberikan 7. Bidang usaha 8. Nama obyek/ perusahaan yang dinilai 9. Metode penilaian	Data mengenai entitas yang merupakan klien KJPP untuk pemberian jasa penilaian dan jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penilaian	Elektronik	Online	1 September 2013	Tahunan (paling lambat akhir bulan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		10. Nomor dari tanggal laporan 11. Hasil penilaian objek yang dinilai 12. Penilai publik yang menandatangani laporan hasil penilaian	dalam jutaan rupiah				
		XI. Daftar Tenaga Kerja Asing KJPP, paling sedikit memuat: 1. Nama KJPP 2. NPWP KJPP 3. Nama tenaga asing 4. Nomor dan tanggal izin kerja dari instansi 5. Kewarganegaraan 6. Keahlian 7. Rencana kerja 8. Jangka waktu penugasan		Elektronik	Online	1 September 2013	Tahunan (paling lambat akhir bulan Desember)
		XII. Laporan Keuangan KJPP, paling sedikit memuat: 1. Nama KJPP 2. NPWP KJPP 3. Tahun buku 4. Neraca Komparatif 5. Laporan Laba Rugi Komparatif 6. Catatan atas Laporan Keuangan		Elektronik	Online	1 September 2013	Tahunan (paling lambat akhir bulan Desember)
30	BPJS Ketenagakerjaan	I. Data Pendaftaran Perusahaan, paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 3. Alamat Perusahaan 4. NPWP 5. Bentuk Badan Hukum 6. Jenis Usaha Utama 7. Kepemilikan 8. Jumlah Tenaga Kerja		Elektronik	Online	1 Maret 2014	Bulanan
		II. Data Tenaga Kerja Peserta BPJS Ketenagakerjaan, paling sedikit memuat: 1. Nama Peserta 2. Nomor Kartu Peserta 3. Alamat Peserta 4. NPWP Peserta 5. Tanggal Lahir		Elektronik	Online	1 Maret 2014	Bulanan

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Status Peserta					
		III. Rincian Iuran Tenaga Kerja, paling sedikit memuat: 1. Nomor Kartu Peserta 2. Periode /Masa Laporan 3. Data Upah 4. Iuran JKK 5. Iuran JKM 6. Iuran JP Tenaga Kerja 7. Iuran JP Perusanaan 8. Iuran JHT TK 9. Iuran JHT Perusahaan	Meliputi: a. total upah setahun b. jumlah bulan upah	Elektronik	Langsung	1 Maret 2014	Tahunan
		IV. Data Pendaftaran Proyek Konstruksi, paling sedikit memuat: 1. Nomor Pendaftaran 2. Nama Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. Sumber Pembiayaan Proyek 5. Nilai Kontrak Kerja Konstruksi (NKKK) 6. Nilai Komponen Upah dari NKKK 7. Macam/Jenis Pekerjaan 8. Lokasi Proyek 9. Nomor IMB-PB 10. Tanggal IMB-PB 11. Nomor IMB 12. Tanggal IMB 13. Pemilik Proyek 14. Jumlah Tenaga Kerja 15. Tanggal Awal Proyek 16. Tanggal Akhir Proyek 17. SPK/Kontrak		Elektronik	Langsung	1 Maret 2014	Tahunan
37	Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi	I. Data Kepemilikan Kendaraan Bermotor, paling sedikit memuat: 1. Nomor Polisi 2. Nama Pemilik 3. Alamat 4. Tahun pembuatan		Elektronik	Langsung	15 Maret 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) 6. Jenis Kendaraan 7. Merk Kendaraan 8. Tipe Kendaraan 9. Isi Silinder (CC) 10. Bahan bakar					
		II. Data Pegawai Negeri Sipil Daerah, paling sedikit memuat: 1. Nama Satker/SKPD 2. Kode Satker/SKPD 3. NIP Pegawai 4. NPWP Pegawai 5. Nama Pegawai 6. Alamat Pegawai 7. Tanggal Lahir 8. Jenis Kelamin 9. NIK 10. Telepon 11. Penghasilan Bruto 12. Penghasilan Neto 13. Neto disetahunkan 14. PTKP 15. PKP 16. PPh Terutang 17. PPh Dipotong 18. PPh KB/LB 19. NPWP Bendahara Gaji 20. Penghasilan Final 21. PPh Final		Elektronik	Online	30 Juni 2016 untuk Tahun Anggaran 2015	Tahunan (paling lambat tanggal 10 Februari)
		III. Data Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap, paling sedikit memuat: 1. Nomor SIUP 2. Tanggal SIUP 3. Status usaha (Perorangan/Badan Usaha) 4. Nama Perorangan /Badan Usaha 5. NPWP Perorangan/Badan Usaha	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut. Yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah: CV, PT, Firma, Yayasan, Koperasi, Kelompok, Perkumpulan dsb NPWP Perorangan /Badan Usaha adalah	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Alamat Domisili Perorangan/Badan Usaha 7. Nama Penanggung Jawab Badan Usaha 8. Nomor Induk Kependudukan, Perorangan/ Penanggung Jawab Badan Usaha 9. NPWP Penanggung Jawab Badan Usaha 10. Nama Pemegang Saham Dominan Badan Usaha 11. Nomor Induk Kependudukan Pemegang Saham Dominan	NPWP cabang/domisili Nomor Induk Kependudukan Pemegang Saham Dominan diisi jika Orang Pribadi				
		IV. Data Surat Izin Penangkapan Ikan, (SIPI), paling sedikit memuat: 1. Nomor SIUP 2. NPWP pemegang SIUP 3. Nama pemegang SIUP 4. Alamat pemegang SIUP 5. Nomor SIPI 6. Tanggal SIPI 7. Tanggal kadaluwarsa SIPI 8. Nama kapal 9. Gross Ton (GT) 10. Muat bersih (NT) 11. Volume palka 12. Alat tangkap 13. Tanda selar 14. Wilayah pengelolaan perikanan (WPP RI) 15. Status izin SIPI (Baru/Perpanjangan/ Perubahan/ Penggantian)	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)
		V. Data Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), paling sedikit memuat: 1. Nomor izin SIUP 2. NPWP pemegang SIUP 3. Nama pemegang SIUP 4. Alamat pemegang SIUP 5. Nomor izin SIKPI 6. Tanggal izin SIKPI 7. Tanggal kadaluwarsa izin SIKPI 8. Nama kapal	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		9. Gross Ton (GT) 10. Muat bersih (NT) 11. Volume palka 12. Tanda selar 13. Status izin SIKPI (Baru/Perpanjangan/Perubahan/ Penggantian)					
		VI. Data Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP) Ikan berdasarkan <i>logbook</i> , paling sedikit memuat: 1. Nama pemilik 2. Nomor SIUP 3. NPWP perorangan/ Badan Usaha 4. Alamat 5. Jenis izin 6. Penanggung jawab 7. Nama kapal 8. Gross Ton kapal 9. Muat bersih (NT) 10. Volume palka 11. Nomor SIPI/SIKPI 12. Alat tangkap 13. Jenis ikan 14. Produksi (Satuan Ton)	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut. Jenis Izin: Penangkapan, Pengangkut/Pengumpul	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)
		VII. Data Unit Pengolahan Ikan (UPI), paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan/Perorangan 2. Alamat domisili unit pengolahan ikan 3. NPWP perusahaan/perorangan 4. Nomor SIUP Pengolahan 5. Tanggal SIUP Pengolahan 6. Tanggal kadaluarsa SIUP Pengolahan 7. Jumlah kapasitas produksi 8. Jumlah produksi 9. Jenis olahan (Beku, Segar, Pengalengan, Ikan Kayu, Pengasapan, Pengeringan, lainnya)	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		VIII. Laporan Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan / Pelabuhan Perikanan/PPI/TPI (UPT Daerah), paling sedikit memuat: 1. Nama pelabuhan 2. Nama kapal 3. Nomor SIPI/SIKPI 4. Nomor izin SIUP 5. NPWP pemegang SIUP 6. Nama pemegang SIUP 7. Alamat pemegang SIUP 8. Jenis alat tangkap 9. Waktu penangkapan 10. Daerah penangkapan 11. Pelabuhan pangkalan 12. Jenis ikan 13. Berat ikan	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)
		IX. Data Pembayaran Pungutan Hasil Perikanan (PHP) yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah, paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan/perorangan 2. Nomor SIUP 3. NPWP pemegang SIUP 4. Nama pemegang SIUP 5. Alamat pemegang SIUP 6. Nomor SIPI 7. Periode pembayaran 8. Tarif 9. Dasar pengenaan 10. Nilai pungutan	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)
		X. Data Laporan Pemasaran Hasil Penangkapan Ikan, paling sedikit memuat: 1. Nomor izin SIUP 2. NPWP pemegang SIUP 3. Nama pemegang SIUP 4. Alamat pemegang SIUP 5. Jenis pemasaran 6. Jenis ikan yang dipasarkan	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut. Ekspor atau dalam negeri	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Jumlah ikan yang dipasarkan 8. Nilai ikan yang dipasarkan	Satuan Ton Dalam Rupiah				
		XI. Data Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya, paling sedikit memuat: 1. Nomor SIUP/Tanda Pendaftaran 2. Tanggal SIUP/Tanda Pendaftaran 3. Status usaha 4. Nama perusahaan/perorangan 5. NPWP perusahaan/perorangan 6. Alamat domisili perusahaan/perorangan 7. Nama penanggung jawab 8. Nomor identitas penanggung jawab 9. NPWP penanggung jawab 10. Jenis perizinan 11. Jenis komoditas budidaya 12. Alamat kegiatan budidaya 13. Luas areal budidaya 14. Koordinat areal budidaya	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut. Status usaha: Perorangan atau Perusahaan Pembibitan; Pembesaran; Pembibitan dan Pembesaran.	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)
		XII. Data Laporan Kegiatan Usaha (LKU) Perikanan Budidaya, paling sedikit memuat: 1. Nama pemilik 2. Nomor SIUP/Tanda Pendaftaran 3. NPWP perorangan/Badan Hukum 4. Alamat perorangan/Badan Hukum 5. Penanggung jawab 6. NPWP penanggung jawab 7. Jenis perizinan 8. Alamat kegiatan budidaya 9. Tahun laporan 10. Triwulan laporan 11. Jenis komoditas budidaya 12. Produksi	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut. Jenis Perizinan: Pembibitan; Pembesaran: Pembibitan dan Pembesaran Satuan Ton	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		XIII. Data Laporan Pemasaran Hasil Budidaya Ikan, paling sedikit memuat: 1. Nomor izin SIUP 2. NPWP pemegang SIUP 3. Nama pemegang SIUP 4. Alamat pemegang SIUP 5. Jenis pemasaran 6. Jenis ikan yang dipasarkan 7. Jumlah ikan yang dipasarkan 8. Nilai ikan yang dipasarkan	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)
		XIV. Data Pertambangan, paling sedikit memuat data: 1. Nama pemegang izin pertambangan 2. NPWP pemegang izin pertambangan 3. Alamat pemegang izin pertambangan 4. Instansi penerbit dari izin pertambangan (Pusat, Gubernur atau Bupati) 5. Kode wilayah izin usaha pertambangan 6. Wilayah izin usaha pertambangan (lokasi Kabupaten/Kota) 7. Luas izin usaha pertambangan 8. Jenis izin yang diterbitkan (IUP/IUPK/IPR/ IUP OPK/IUJP) 9. Nomor izin pertambangan 10. Tanggal penerbitan izin pertambangan 11. Jangka waktu berlaku izin pertambangan 12. Tahapan kegiatan (penyelidikan umum/studi kelayakan/eksplorasi/konstruksi/produksi) 13. Tahun mulai produksi 14. Jenis hasil tambang (jenis mineral atau batu bara) 15. Jumlah produksi (ton atau satuan tambang lainnya) 16. Jumlah penjualan (ton atau satuan tambang lainnya) 17. Nilai penjualan domestik (IDR/USD) 18. Nilai penjualan ekspor (IDR/USD) 19. Tujuan penjualan domestik	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	20 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 10 Februari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		20. Tujuan penjualan ekspor 21. Nilai iuran tetap eksplorasi atau operasi produksi 22. Nilai iuran produksi (Royalti) 23. Tarif iuran tetap 24. Tarif royalti 25. Periode pembayaran iuran 26. SK Pengakhiran Izin Pertambangan (nomor dan tanggal) 27. Peta sebaran tambang 28. Jumlah pembelian (ton atau satuan tambang lainnya) 29. Nilai pembelian (IDR/USD)					
		XV. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB)		Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 10 Februari)
		XVI. Data Budidaya Hortikultura, paling sedikit memuat: 1. Nama pemegang izin 2. NPWP pemegang izin 3. Alamat pemegang izin 4. Instansi penerbit izin (Pusat/Gubernur/Bupati/Walikota) 5. Jenis izin yang diterbitkan 6. Nomor izin 7. Tanggal penerbitan izin 8. Jangka waktu berlakunya izin 9. Kode wilayah izin 10. Wilayah lokasi berada 11. Koordinat luas wilayah 12. Luas wilayah 13. Tahapan kegiatan usaha 14. Jenis tanaman/komoditas 15. Luas tanam (Ha)	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut. Meliputi tanaman sayuran, tanaman buah, tanaman hias dan tanaman obat Antara lain: Tanda Daftar Usaha Budidaya Hortikultura, Izin Usaha Budidaya Hortikultura	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		16. Waktu tanam/pola tanam 17. Jumlah tanaman 18. Jumlah produksi (Kg/Kw/Ton) 19. Kapasitas unit usaha 20. Jumlah tenaga kerja 21. Jumlah pemakaian pupuk/pestisida per Ha 22. Realisasi pembenihan dan pembibitan (Kg/Batang) 23. Jumlah pabrik pengolahan pemegang izin di wilayah Pemda 24. Kapasitas produksi pabrik pengolahan 25. Realisasi produksi pabrik pengolahan 26. Realisasi omset penjualan hasil pengolahan 27. Nilai penjualan domestik 28. Nilai penjualan ekspor 29. Jenis retribusi 30. Jumlah Iuran Retribusi/PAD 31. Tarif Iuran Retribusi/PAD 32. Periode Pembayaran Iuran Retribusi/PAD 33. Dasar Pengenaan Iuran Retribusi/ PAD	Setiap penjualan				
		XVII. Data Jumlah Rata-rata Produksi per Komoditas Tanaman per Ha, untuk Setiap Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan
		XVIII. Data Budidaya Tanaman Pangan/Pertanian, paling sedikit memuat: 1. Nama pemegang izin 2. NPWP pemegang izin 3. Alamat pemegang izin 4. Instansi penerbit izin (Pusat/Gubernur/Bupati/Walikota) 5. Jenis izin yang diterbitkan (antara lain: IUTP, IUTP-P, IUTP-PT, TDU, TDU-P, TDU-PP) 6. Nomor izin 7. Tanggal penerbitan izin 8. Jangka waktu berlakunya izin 9. Kode wilayah Izin 10. Wilayah lokasi Pertanian 11. Koordinat luas wilayah pertanian	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		12. Luas wilayah pertanian 13. Jenis tanaman/komoditas 14. Jumlah luas tanam 15. Jumlah luas panen 16. Jumlah penggunaan pupuk dan pestisida 17. Produktivitas/Provitas (Kg per meter persegi) 18. Jumlah produksi (ton) 19. Omset penjualan hasil pertanian 20. Nilai penjualan domestik 21. Nilai penjualan ekspor 22. Jumlah buruh/karyawan 23. Jumlah retribusi/PAD 24. Tarif Iuran retribusi/ PAD 25. Periode pembayaran iuran retribusi/PAD 26. Dasar pengenaan iuran retribusi/PAD	Setiap penjualan				
		XIX. Data Perkebunan dan Kehutanan, paling sedikit memuat: 1. Nama pemegang izin 2. NPWP pemegang izin 3. Alamat pemegang izin 4. Instansi penerbit izin (Pusat, Gubernur atau Bupati) 5. Jenis izin yang diterbitkan (antara lain: IUP, IUP-B, IUP-P, IPL, STD-B, STD- P, IPAB) 6. Nomor izin 7. Tanggal penerbitan izin 8. Jangka waktu berlakunya izin 9. Kode wilayah Izin 10. Wilayah lokasi perkebunan/kehutanan berada 11. Koordinat luas wilayah perkebunan/kehutanan 12. Luas wilayah perkebunan/kehutanan 13. Tahapan kegiatan usaha 14. Jenis tanaman/komoditas 15. Kelas lahan 16. Jumlah kapasitas produksi lahan	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	1 April 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 1 April)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		17. Jumlah realisasi produksi lahan 18. Jumlah penggunaan pupuk dan pestisida 19. Realisasi pembenihan dan pembibitan 20. Jumlah pabrik pemegang izin di wilayah Pemda 21. Kapasitas produksi pabrik perkebunan/kehutanan 22. Realisasi produksi pabrik perkebunan/kehutanan 23. Realisasi omset penjualan hasil perkebunan/kehutanan 24. Nilai penjualan domestik 25. Nilai penjualan ekspor 26. Biaya gaji/upah buruh 27. Biaya gaji karyawan 28. Jumlah buruh/karyawan 29. Jumlah iuran sektor perkebunan/kehutanan ke Pemda 30. Tarif iuran sektor perkebunan/kehutanan 31. Periode pembayaran iuran 32. Topografi 34. Curah hujan dan hari hujan 35. Investasi 36. Kendaraan/mobil alat berat 37. Pemanfaatan lahan 38. Produksi kebun inti 39. Bahan olah 40. Pembangunan kebun plasma 41. Produksi kebun plasma 42. Pemanfaatan produk sampingan/turunan	Contohnya: produksi CPO, PKO, kayu bulat, dan Kayu Olahan Contohnya: produksi CPO, PKO, kayu bulat, dan kayu olahan Misalnya: hasil kebun, PKS, kayu, rotan Kelerengan lahan (datar, landai, berombak, berbukit, bergunung) Kebun (luas), Pabrik, Bangunan, Mesin, Prasarana Lain. Jenis, Status Kepemilikan Bangunan, pembibitan, TBM, TM, peremajaan, tanaman tua, penggunaan lain Per Jenis Produk : TBS, CPO, Kernel, PKO Bahan Olah, diolah sendiri atau tempat lain Bangunan, Pembibitan, TBM, TM, Peremajaan, Tanaman Tua, Penggunaan lain Per jenis produk: TBS, CPO, Kernel, PKO Jenis Limbah, Bentuk Penanganan				

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		43. Peta sebaran perkebunan/kehutanan 44. Rencana kerja tahunan dan Rencana kerja umum 45. Laporan penilaian perkebunan 46. Laporan Mutasi Kayu Olahan dan Laporan Mutasi Kayu Bulat					
38	Seluruh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten	I. Data Kepemilikan Hotel/Penginapan, paling sedikit memuat: 1. Nama hotel/penginapan 2. Alamat hotel/penginapan 3. Jumlah kamar 4. Kelas hotel 5. Nama pemilik/pengelola 6. Alamat pemilik/pengelola 7. Jumlah Pajak Hotel		Elektronik	Langsung	15 Maret 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)
		II. Data Kepemilikan Restoran, paling sedikit memuat: 1. Nama Restoran 2. Alamat Restoran 3. Nama Pemilik/pengelola 4. Alamat pemilik/pengelola 5. Kapasitas pengunjung 6. Jumlah karyawan 7. Jumlah Pajak Restoran		Elektronik	Langsung	15 Maret 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)
		III. Data Usaha Hiburan, paling sedikit memuat: 1. Nama usaha hiburan 2. Alamat usaha hiburan 3. Nama pemilik/pengelola 4. Alamat pemilik/pengelola 5. Jenis hiburan 6. Jumlah Pajak Hiburan		Elektronik	Langsung	15 Maret 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)
		IV. Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), paling sedikit memuat: 1. Nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan bangunan 2. Alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan bangunan 3. Alamat objek		Elektronik	Langsung	15 Maret 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Nilai perolehan objek pajak 5. Luas tanah dan/atau bangunan 6. Tanggal Transaksi 7. Nilai BPHTB					
		V. Data Surat Izin Usaha, paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Nama perusahaan 3. Alamat perusahaan 4. Jenis usaha 5. Nama pemilik 6. Alamat pemilik 7. Klasifikasi 8. Modal 9. Jumlah karyawan 10. Masa berlaku		Elektronik	Langsung	15 Maret 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)
		VI. Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB), paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama pemohon 4. Alamat pemohon 5. Lokasi bangunan 6. Luas bangunan 7. Jumlah lantai 8. Fungsi/peruntukan bangunan 9. Status tanah		Elektronik	Langsung	15 Maret 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)
		VII. Data Pegawai Negeri Sipil Daerah, paling sedikit memuat: 1. Nama Satker/SKPD 2. Kode Satker/SKPD 3. NIP pegawai 4. NPWP pegawai 5. Nama pegawai 6. Alamat pegawai 7. Tanggal lahir 8. Jenis kelamin 9. NIK		Elektronik	Online	30 Juni 2016 untuk Tahun Anggaran 2015	Tahunan (paling lambat tanggal 10 Februari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		10. Telepon 11. Penghasilan bruto 12. Penghasilan neto 13. Neto disetahunkan 14. PTKP 15. PKP 16. PPh terutang 17. PPh dipotong 18. PPh KB/LB 19. NPWP Bendahara gaji 20. Penghasilan final 21. PPh Final					
40	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Data Pemenang Lelang, yang terdiri dari: 1. NPWP 2. Nama pemenang 3. Alamat 4. Nomor telepon 5. Jenis usaha 6. Tanggal izin usaha 7. Masa berlaku izin usaha 8. Nama paket pekerjaan 9. Lokasi paket pekerjaan 10. Tanggal kontrak 11. Nilai kontrak 12. Tanggal surat perintah mulai kerja 13. Masa pelaksanaan	Jenis usaha meliputi: 1. Jasa konstruksi 2. Jasa konsultan 3. Penyedia barang/jasa lainnya	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat 7 hari kerja setelah akhir triwulan)
41	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	I. Data Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), paling sedikit memuat: 1. Nama badan hukum 2. NPWP badan hukum 3. Alamat badan hukum 4. Nama LKP 5. Alamat LKP 6. Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) 7. Tanggal berdiri LKP		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (tanggal 30 April tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Alamat <i>email</i> LKP 9. Alamat <i>website</i> LKP 10. Nomor telepon LKP 11. Nomor fax LKP 12. Nama pimpinan LKP 13. NIK pimpinan LKP					
		II. Data Sertifikasi Guru, paling sedikit memuat: 1. Nama guru 2. Alamat rumah 3. Tempat dan tanggal lahir guru 4. NPWP guru 5. NIK guru 6. Nomor registrasi guru (NRG) 7. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) 8. Nama instansi tempat mengajar 9. Alamat instansi tempat mengajar	Seluruh data diisi selengkap mungkin sesuai data yang dimiliki	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (tanggal 30 April tahun berikutnya)
		III. Data Penerima Data Bantuan Sosial, paling sedikit memuat: 1. Nama badan hukum 2. NPWP badan hukum 3. Alamat badan hukum 4. Status penerima Bantuan Sosial 5. Tanggal pendirian 6. Alamat <i>email</i> 7. Alamat <i>website</i> 8. Nomor telepon 9. Nomor faksimile 10. Nama pimpinan 11. NIK pimpinan 12. Nama program bantuan sosial 13. Nilai bantuan sosial	Seluruh data diisi selengkap mungkin sesuai data yang dimiliki Komunitas Budaya/Sekolah Negeri/ Sekolah Swasta/Lembaga Peduli Pendidikan	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (tanggal 30 April tahun berikutnya)
54	Kementerian Kelautan dan Perikanan	I. Data Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan/perorangan		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. NPWP perusahaan/perorangan 3. Alamat perusahaan/perorangan 4. Domisili hukum 5. Nomor izin 6. Tanggal izin 7. Nomor identitas penanggung jawab 8. Nama penanggung jawab 9. NPWP penanggung jawab	dapat berupa NIK/No Paspor				setiap bulan Januari)
		II. Data Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), paling sedikit memuat: 1. Nomor izin SIUP 2. Nama kapal 3. Nomor izin SIPI 4. Tanggal izin SIPI 5. Tanggal kadaluwarsa SIPI 6. Gross Ton (GT) 7. Alat tangkap 8. Tanda selar 9. Wilayah penangkapan 10. Status izin		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)
		III. Data Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), paling sedikit memuat: 1. Nomor izin SIUP 2. Nama kapal 3. Nomor izin SIKPI 4. Tanggal izin SIKPI 5. Tanggal kadaluwarsa SIKPI 6. Gross ton 7. Tanda selar 8. Status izin		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)
		IV. Data Sertifikat Kelayakan Pengolahan, paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan/perorangan 2. Alamat unit pengolahan ikan 3. Jenis produk 4. Nomor izin produk 5. Tanggal terbit izin produk	Sertifikat yang diberikan kepada unit pengolahan ikan yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasional standar sanitasi.	Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Tanggal masa berlaku produk 7. NPWP perusahaan dan/atau NIK penanggung jawab					
		V. Data Izin Pemasukan Hasil Perikanan, paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan/penanggung jawab 2. Alamat perusahaan/penanggung jawab 3. Nomor izin 4. Tanggal izin 5. Masa berlaku 6. Jenis Produk yang akan dimasukkan 7. Jumlah produk yang akan dimasukkan 8. Tempat pemasukkan 9. NPWP perusahaan dan/atau NIK penanggung jawab		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)
		VI. Data Lalu Lintas Ikan di dalam dan luar negeri (ekspor, impor, antar wilayah dalam negeri), paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan/perorangan 2. Alamat perusahaan/perorangan 3. Nomor izin instalasi karantina ikan 4. Tanggal izin instalasi karantina ikan 5. Masa berlaku 6. Wilayah pemasaran 7. Jenis lalu lintas (ekspor, impor, antar wilayah dalam negeri) 8. Jenis Produk yang dipasarkan 9. Jumlah produk yang dipasarkan/tahun 10. NPWP perusahaan/perorangan 11. Nama pemilik/penanggung jawab 12. NIK pemilik/penanggung jawab	Wilayah pemasaran berisi negara tujuan	Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)
		VII. Data Izin Penyediaan Obat Ikan (Produsen, Importir), paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan/perorangan 2. NPWP perusahaan/perorangan 3. Alamat 4. Status (produsen/importir) 5. Nomor izin		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Tanggal izin 7. Masa berlaku 8. Nama pemilik/penanggung jawab 9. NIK pemilik/penanggung jawab					
		VIII. Data Produsen Perbenihan, paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan/perorangan 2. NPWP perusahaan 3. Alamat perusahaan/perorangan 4. Jenis komoditas perbenihan (tawar/payau/laut) 5. Jumlah omzet tahunan (ekor) 6. Nama pemilik/penanggung jawab 7. NIK pemilik/penanggung jawab		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)
		IX. Data Usaha Budidaya, paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan 2. NPWP perusahaan 3. Alamat 4. Jenis perizinan 5. Nomor izin 6. Tanggal izin 7. Masa berlaku 8. Komoditas budidaya 9. Nama penanggung jawab 10. NIK penanggung jawab	Jenis Perizinan/Rekomendasi: 1. Izin Pemasukan Ikan Hidup 2. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan di Bidang Pembudidayaan Ikan 3. Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal	Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)
		X. Data Pendaftaran Pakan Ikan, paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan/perorangan 2. Alamat perusahaan/perorangan 3. Merk produk 4. Nomor pendaftaran/sertifikat 5. Tanggal terbit pendaftaran/sertifikat	Jumlah Produk per 6 (enam) bulan	Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Tanggal Masa berlaku 7. Jumlah produk 8. NPWP perusahaan dan/atau NIK penanggung jawab 9. Nama perusahaan/perorangan	Jumlah Produk per 6 (enam) bulan				
		XI. Data Transaksi Importase Obat Ikan		Elektronik	Langsung	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya)
		XII. Data Harga Benih Ikan/Udang per Provinsi		Elektronik	Langsung	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya)
		XIII. Data Produksi Pakan Ikan		Elektronik	Langsung	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya)
55	Kementerian Ketenagakerjaan	I. Data Pengguna Tenaga Kerja Asing, paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan/instansi 2. NPWP perusahaan/instansi 3. Alamat perusahaan/instansi 4. Nomor telepon, <i>fax</i> , <i>email</i> 5. Jumlah tenaga kerja asing	Data pengguna tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.	Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Triwulanan, (Paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah triwulan yang bersangkutan)
		II. Daftar Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Indonesia, paling sedikit memuat: 1. Nama LPTKS 2. NPWP LPTKS 3. Nama pimpinan atau penanggung jawab LPTKS 4. Alamat LPTKS	Data yang disampaikan sebatas data LPTKS yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan	Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Desember)
		III. Daftar Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan 2. NPWP perusahaan	Data yang disampaikan sebatas data PPTKIS yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan	Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Nama pimpinan atau penanggung jawab 4. Alamat perusahaan					
59	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	I. Data Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (IUPHHK-HA), paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	01 Desember 2004	Tahunan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)
		II. Data Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	01 Desember 2004	Tahunan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)
		III. Data Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE), paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama pertanggung jawab		Elektronik	Langsung	01 Desember 2004	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi					
		IV. Data Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	01 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)
		V. Data Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	01 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)
		VI. Data Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon dan/atau Penyimpanan Karbon (IUP RAPKARBON dan/atau IUP PAN-KARBON), paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan		Elektronik	Langsung	01 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Nama penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi					
		VII. Data Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas di atas 6000m3/thn (IUIPHHK >6000 m3/thn), paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	01 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)
		VIII. Data Izin Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	01 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)
		IX. Data Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan/Non Tambang, paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan		Elektronik	Langsung	01 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi					
		X. Data Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Survey/Eksplorasi, paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	01 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)
		XI. Data Izin Lembaga Konservasi (LK), paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	01 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		XII. Data Izin Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL), paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	01 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)
		XIII. Data Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar, paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi 11. Kuota Edar Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)		Elektronik	Langsung	01 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)
		XIV. Data Izin Usaha Penyedia Sarana Wisata Alam (IUPSWA), paling sedikit memuat: 1. Nomor lain 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	01 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		XV. Data Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJWA), paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	01 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)
		XVI. Data Izin Ekspor Benih/Bibit Tanaman Hutan, paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	01 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)
		XVII. Data Izin Impor Benih/Bibit Tanaman Hutan, paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	01 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)
62	Kementerian Riset, Teknologi, dan	Data Sertifikasi Dosen, paling sedikit memuat: 1. Nama dosen	Seluruh data diisi selengkap mungkin sesuai data yang dimiliki	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (30 April tahun

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pendidikan Tinggi	2. Alamat rumah 3. Tempat dan tanggal lahir dosen 4. NPWP dosen 5. NIK dosen 6. Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) 7. Nama instansi tempat mengajar 8. Alamat instansi tempat mengajar					berikutnya)
63	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	I. Data pemenang lelang melalui <i>e-auction</i> , paling sedikit memuat: 1. Nama pemenang lelang 2. NPWP pemenang Lelang 3. NIK pemenang lelang 4. Alamat pemenang lelang 5. Email pemenang lelang 6. Jenis lelang 7. Uraian Lelang 8. Nilai Lelang 9. Tanggal pelaksanaan lelang 10. Nama pemohon lelang 11. Alamat pemohon lelang 12. Penyelenggara	Nama, pemilik objek, dan lokasi objek Nama KPKNL	Elektronik	Online	31 Maret 2016	Bulanan (paling lambat akhir bulan berikutnya)
		II. Data balai lelang, paling sedikit memuat: 1. Nama badan hukum 2. Nama penanggung jawab 3. NPWP 4. Nomor izin 5. Masa berlaku izin 6. Status (Aktif/Tidak aktif) 7. Alamat 8. Frekuensi lelang per tahun 9. Pokok lelang dalam satu tahun 10. Bea lelang dalam satu tahun		Elektronik	Online	31 Maret 2016	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)
		III. Data pejabat lelang kelas II, paling sedikit memuat: 1. Nama Pejabat lelang 2. NIK 3. NPWP		Elektronik	Online	31 Maret 2016	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Nomor izin 5. Masa berlaku izin 6. Status (Aktif/Tidak Aktif) 7. Alamat 8. Frekuensi lelang 9. Pokok lelang 10. Bea lelang					
64	PT Taspen (Persero)	I. Data penerima pensiun, paling sedikit memuat: 1. NPWP 2. NIP atau NRP 3. Nama 4. Alamat 5. Jenis Kelamin 6. Tanggal Lahir 7. Status Tanggungan 8. Tahun perolehan 9. Penghasilan Bruto 10. Penghasilan Neto 11. Penghasilan Neto setahun/disetahun-kan 12. PTKP 13. PKP 14. PPh terutang 15. PPh dipotong 16. PPh KB/LB 17. Kantor bayar 18. NIK 19. Telepon 20. NPWP kantor cabang 21. Nama kantor cabang	Nomor Induk Pegawai/Nomor Registrasi Prajurit (untuk TNI)	Elektronik	Online	31 Maret 2016	Tahunan, paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya
		II. Data Peserta Aktif, paling sedikit memuat: 1. NIP atau NRP 2. Nama 3. NIK 4. Pangkat/golongan 5. Alamat 6. Jenis kelamin	Peserta aktif meliputi data PNS Pusat dan Daerah	Elektronik	Online	31 Maret 2016	Tahunan, paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Tanggal lahir 8. Nama instansi 9. Gaji pokok 10. NPWP kantor cabang 11. Nama kantor cabang					
65	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial	I. Data izin undian gratis berhadiah, paling sedikit memuat: 1. Nama penerima izin 2. Alamat lengkap penerima izin 3. NPWP penerima izin 4. Nama program 5. Nomor registrasi 6. Periode 7. Total hadiah 8. Jangka waktu penyelenggaraan 9. Nomor Surat Keputusan Menteri 10. Aktivitas terakhir 11. Jatuh tempo laporan 12. Status 13. Jumlah hadiah 14. Waktu penyelenggaraan		Elektronik	Online	31 Maret 2016	Tahunan, paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya
		II. Data pemenang Undian Gratis Berhadiah, paling sedikit memuat: 1. Nama 2. NPWP 3. Alamat 4. Uraian hadiah yang diterima 5. Jumlah hadiah yang diterima 6. Nilai hadiah yang diterima 7. Waktu pengambilan hadiah 8. PPh Final atas hadiah undian 9. Tanggal penyetoran SSP 10. NTPN		Elektronik	Online	31 Maret 2016	Tahunan, paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya
66	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Database registrasi produk dan perusahaan pemilik produk, paling sedikit memuat: 1. Nomor registrasi 2. Tanggal terbit		Elektronik	Online	31 Maret 2016	Semesteran

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Jenis produk 4. Nama produk 5. Nama perusahaan pendaftar 6. Alamat perusahaan pendaftar 7. Nama produsen 8. Alamat produsen 9. NPWP perusahaan pendaftar	Jenis produk: obat/obat tradisional/ kosmetik/suplemen makanan/produk pangan Merk produk				
67	Bank/Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit, meliputi: 1. Pan Indonesia Bank, Ltd.Tbk. 2. PT Bank ANZ Indonesia 3. PT Bank Bukopin, Tbk. 4. PT Bank Central Asia, Tbk. 5. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. 6. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 7. PT Bank MNC Internasional 8. PT Bank ICBC Indonesia 9. PT Bank Maybank Indonesia,Tbk 10. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 11. PT Bank Mega, Tbk. 12. PT Bank Negara indonesia 1946 (Persero), Tbk 13. PT Bank Negara Indonesia Syariah	Data Transaksi Nasabah Kartu Kredit, paling sedikit memuat: 1. Nama bank 2. Nomor rekening kartu kredit 3. ID <i>merchant</i> 4. Nama <i>merchant</i> 5. Nama pemilik kartu 6. Alamat pemilik kartu 7. NIK/Nomor paspor pemilik kartu 8. NPWP pemilik kartu 9. Bulan tagihah 10. Tanggal transaksi 11. Rincian transaksi 12. Nilai transaksi 13. Pagu kredit	Data bersumber dari <i>Billing Statement</i> Nama bank/lembaga penyelenggara kartu kredit NIK untuk WNI; Nomor paspor untuk WNA Keterangan transaksi Dalam Rupiah Limit kartu kredit	Elektronik	Online dan/atau langsung	Paling lambat 31 Mei 2016	Bulanan (paling lambat akhir bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	14. PT Bank OCBC NISP, Tbk. 15. PT Bank Permata, Tbk. 16. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 17. PT Bank Sinarmas 18. PT Bank UOB Indonesia 19. Standard Chartered Bank 20. The Hongkong & Shanghai Banking Corp. 21. PT Bank QNB Indonesia 22. Citibank N. A 23. PT AEON Credit Services						

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO